

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENAGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS KELUARGA DI KOTA SEMARANG
(KAJIAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN)**

Oleh

Agus Widiarma , Sri Suwitri

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi negara Indonesia, kemiskinan juga menjadi masalah bagi kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti Kota Semarang. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga adalah salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan milenium dengan memberdayakan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sebuah negara. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, terutama dampak pada ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori jenis-jenis dampak menurut Samudra Wibawa dan Kusumanegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik *purposive* pengambilan informan dan menggunakan teknik triangulasi data. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dilaksanakan dengan baik oleh instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab melaksanakannya. Namun masih banyak sasaran yang belum tercapai meskipun pelaksanaannya sudah sangat baik, ini disebabkan kurangnya timbal balik dari masyarakat. Kemudian untuk dampak yang dihasilkan, untuk dampak ekonomi dampak yang diberikan tidak terlalu signifikan mengingat jumlah penduduk miskin masih fluktuatif selain kemiskinan pola makan dan konsumsi terdampak program juga mengalami perbaikan, untuk dampak kualitas kehidupan, dapat dilihat dari pendidikan dan kesehatan masyarakat. Secara umum program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat akan tetapi dampak yang dihasilkan belum terlalu signifikan.

Kata kunci : *Kemiskinan, Dampak, , penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, Ekonomi, kualitas kehidupan*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ada di setiap negara di dunia. Kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan pembangunan ekonomi di suatu negara, diantara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sehingga persoalan tersebut menjadi masalah besar bagi setiap negara di dunia untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Pada mulanya banyak negara berkembang mengindentikan pertumbuhan ekonomi dengan cara menaikkan pendapatan perkapita masyarakatnya. Usaha tersebut dapat memberikan dampak berarti bagi ekonomi negara.

Untuk mengatasi kemiskinan tersebut pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan kebijakan pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Program ini ditujukan untuk percepatan upaya pengentasan kemiskinan dengan mengurangi beban keluarga, sekaligus memberdayakan keluarga. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga ini juga berupaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan berperan dalam mencapai tujuan millenium negara

Indonesia. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga ini dituangkan dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jenis program bantuan bersyarat yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia sekaligus berusaha mencapai tujuan pembangunan Millenium atau MDGs. Komponen MDGs yang didukung oleh pelaksanaan PKH adalah pengurangan penduduk miskin, pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan angka kematian ibu. Landasan hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial, Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dan Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan.

Sebagai bagian dari negara Republik Indonesia Kota Semarang juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan, Kota Semarang juga melaksanakan Program penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga, kota Semarang juga

melaksanakan Program Keluarga Harapan di wilayahnya, sedangkan di kota Semarang pelaksanaan PKH didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Semarang Nomor 440/60 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Semarang. Tujuan pelaksanaan PKH sendiri menurut buku pedoman umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals(MDGs)

Melihat tujuan tersebut PKH berusaha mengurangi angka kemiskinan dan mencapai tujuan millenium terkait kematian anak dan ibu, kesehatan anak dan ibu dan pendidikan dasar. Tetapi meskipun sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan dengan harapan akan berkurangnya angka kemiskinan, angka kematian balita dan bayi, serta angka kematian ibu, namun jumlah kemiskinan di kota semarang masih tinggi. Pada tahun 2009 penduduk miskin tercatat sebanyak 398.009 jiwa pada tahun 2011 sebesar 448.398 jiwa, tahun 2013 sebesar 373.978 jiwa dan pada tahun 2015 sebesar 367.848 jiwa. Apabila menurut jumlah kepala keluarga, kepala keluarga miskin di Kota Semarang berjumlah

111.558 KK pada tahun 2009, melonjak tajam menjadi 128.647 KK pada tahun 2011, kemudian turun menjadi 113.258 KK pada tahun 2013, kemudian naik lagi menjadi 114.939 KK paada tahun 2015 (BAPPEDA Kota Semarang)

Begitupula dengan kematian anak dan ibu jumlahnya masih tinggi,

Angka Kematian Anak Di Kota Semarang

| Tahun | Jumlah | Per 1000 kelahiran hidup |
|-------|--------|--------------------------|
| 2009 | 204 | 8,1 |
| 2010 | 433 | 16,8 |
| 2011 | 314 | 12,1 |
| 2012 | 293 | 9,0 |
| 2013 | 288 | 9,5 |
| 2014 | 253 | 9,37 |
| 2015 | 224 | -* |

(Dinas Kesehatan Kota Semarang)

*data belum ada tahun masih berjalan

Jumlah Kematian Ibu Di Kota Semarang

| Tahun | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup |
|-------|--------------------|-----------------------------|
| 2009 | 22 | 85,47 |
| 2010 | 19 | 73,80 |
| 2011 | 31 | 119,9 |
| 2012 | 22 | 77,5 |
| 2013 | 29 | 109,2 |
| 2014 | 33 | 122,75 |
| 2015 | 35 | -* |

(Dinas Kesehatan Kota Semarang)

Melihat masih tingginya angka kemiskinan maupun angka kematian ibu dan bayi, menunjukkan kurangnya dampak program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga di kota Semarang, dalam

penelitian ini peneliti akan mencari tahu dampak yang dihasilkan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga di kota Semarang kemudian mendiskripsikan dampak tersebut.

Tinjauan pustaka penelitian ini adalah Thomas R. Dyemen (Syafiie, 2006:105) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan, dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara, hal tersebut disebabkan, "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah

Kebijakan Publik sendiri memiliki rangkaian proses atau tahap yang dilalui, beberapa ahli membagi rangkaian tahap itu menjadi beberapa rangkaian yaitu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. (Budi Winarno, 2014: 35-37). Pada penelitian ini peneliti akan fokus pada evaluasinya.

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir saja melainkan dalam seluruh proses kebijakannya. Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat meliputi perumusan masalah, implementasi, maupun dampak kebijakan (Winarno, 2002 : 166)

Kemudian Michael Borus (Kusumanegara, 2010 : 125) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan atau program memiliki 3 tipe, yaitu :

1. Evaluasi Proses, mengenai bagaimana pelaksanaan program
2. Evaluasi Dampak, akibat apa yang dihasilkan dari suatu program
3. Analisis Strategis, sejauh mana efektifitas program dalam mengatasi suatu masalah.

Selain itu evaluasi kebijakan memiliki beberapa model yang dilihat dari orientasi tujuannya, Lebih jauh model evaluasi ini dibedakan adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi,

1. berorientasi pada tujuan program – *good oriented*,

2. berorientasi pada keputusan – *decision oriented*,
3. berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya – *transactional oriented*, dan
4. berorientasi pada pengaruh dan dampak program – *research oriented*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe evaluasi dampak untuk mengetahui akibat yang dihasilkan dari program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga kota Semarang. Selain itu peneliti juga akan berorientasi terhadap pengaruh dan dampak program.

Evaluasi dampak sendiri merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan. (Samudra Wibawa 1994: 29)

Dalam melakukan evaluasi dampak sendiri memiliki langkah langkah sebagai berikut, ada tiga hal yang harus dikerjakan seorang analis

1. Secara vertikal memetakan jenis jenis dampak yang mungkin terjadi
2. Secara horisontal melihat maupun memprediksi kecenderungan reaksi

yang diberikan oleh subjek yang terkena dampak tersebut.

3. Secara komprehensif merumuskan penyesuaian kebijakan yang harus dilakukan oleh *policy maker*.

Kemudian menurut Weiss dimensi dampak yaitu, wilayah (skope) program, ukuran program, kebaruan program.

1. Waktu, jangka waktu penelitian harus ditentukan, sebab setiap penelitian evaluasi dampak harus memperhatikan dampak suatu program dari waktu ke waktu
2. Hubungan dampak aktual dengan bakal dampak, analisis dampak memerlukan perhatian pada derajat pencapaian program dan apa yang bakal dicapai, tetapi juga pada akibat apa yang terjadi jika program hanya tercapai sebagian atau tidak tercapai sama sekali
3. Tingkat agregasi dampak, suatu program terhadap individu dapat dipelajari dan dampak tingkat individual ini dapat diagregasikan, dirata-rata dan dianalisis dengan berbagai cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada unit yang lebih luas dari individu
4. Tipe tipe dampak, menurut ilmuwan ada empat tipe utama dampak kebijakan
 - a. Dampak pada kehidupan ekonomi, memfokuskan perhatian pada penghasilan, nilai tambah, rasio cost benefit, GNP

- b. Dampak pada proses pembuatan keputusan, dampak yang timbul dari suatu kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan dimasa yang akan datang.
- c. Dampak pada sikap publik seperti dukungan pada sistem politik, mempengaruhi sikap orang yang memperoleh keuntungan maupun publik secara keseluruhan terhadap program kebijakan tertentu terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintah terhadap aparat di kantor dinasny.
- d. Dampak pada kualitas kehidupan, kebijakan berdampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok kelompok individu dan masyarakat secara keseluruhan yang seharusnya bersifat non-ekonomis seperti kesehatan dan pendidikan.

Fenomena penelitian ini adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga di kota Semarang dan upaya mengatasi dampak negatif yang muncul.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan dampak yang terjadi. Metode penentuan informan pemeliti menggunakan metode *purposive* dimana penentuan informan menjadi

subjektif peneliti dan menggunakan *cluster* yaitu pengambilan informan secara acak berdasarkan kelompok tertentu dalam masyarakat dapat berupa kelompok pekerjaan maupun wilayah. Dimana informan peneliti adalah Kepala Bidang Sosial Budaya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang ,Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang , Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang, Masyarakat Terdampak Program. Cara Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Teknik Analisi data menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10) terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan verifikasi.

B. Pembahasan

Dalam bab ini penilit akan menjabarkan mengenai hasil penelitian yaitu pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, dampak yang dihasilkan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga di kota

Semarang terkait dengan akibatnya terhadap angka kemiskinan dan kualitas kehidupan. Kemudian mendeskripsikan cara pemerintah mengatasi dampak negatif yang muncul.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga menurut lampiran Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan adalah penyempurnaan pelaksanaan PKH. Menurut hasil penelitian pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan lampiran intruksi presiden nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, namun ada beberapa tujuan pelaksanaan program yang tidak tercapai yaitu terkait waktu pencairan dana bantuan yang masih belum pasti dan koordinasi antar lembaga untuk memastikan hak warga miskin untuk mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan.

Dampak ekonomi meliputi penghasilan, pola konsumsi dan kemiskinan. Secara keseluruhan menurut penuturan narasumber pola konsumsi mereka berubah menjadi lebih baik akan tetapi pendapatan mereka tidak berubah, kemudian angka kemiskinan menurut jumlah Kepala keluarga memang meningkat dari tahun 2013 angka kemiskinan menurut Kepala Keluarga 113.259 KK sedangkan pada tahun 2015 tercatat terdapat 114.939 KK, akan tetapi

apabila dilihat dari jumlah jiwa jumlah warga miskin kota Semarang malah berkurang yaitu 373.978 jiwa pada tahun 2013 menjadi 367.848 jiwa pada tahun 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga mampu meningkatkan kondisi ekonomi warga miskin di kota Semarang karena membaiknya kondisi ekonomi warga miskin ditunjukkan dengan berkurangnya golongan warga sangat miskin dan miskin menjadi rawan miskin atau bahkan tidak tercatat sebagai warga miskin lagi. Kemudian membaiknya pola konsumsi maupun pola makan menunjukkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat penerima program.

Dampak pada kualitas kehidupan meliputi kesehatan dan pendidikan. Pada kualitas sumber daya manusia kita dapat mengukurnya dari segi kesehatan dan pendidikan. Pada sektor kesehatan dampak dilihat dari kualitas kesehatan, kemudian dilihat dari jumlah kematian ibu dan kematian anak, menurut narasumber program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga berhasil memberikan rasa aman dan nyaman warga miskin apabila menderita gangguan kesehatan, sehingga kualitas kesehatan mereka meningkat. Namun dilihat dari jumlah kematian ibu dan anak di Kota Semarang masih tinggi. Angka kematian ibu di Kota

Semarang dari tahun 2009 – 2015 masih fluktuatif bahkan dalam 3 tahun terakhir memiliki tren meningkat. Selain itu jumlah kematian ibu di kota Semarang pada tahun 2014 berjumlah 33 orang yang apabila di hitung per 100.000 kelahiran maka berjumlah 122,75 jumlah ini melebihi target nasional yang menargetkan 102 kematian per 100.000 kelahiran.

Kemudian kematian anak, apabila dilihat dari tahun 2009-2015 kematian anak di kota Semarang masih fluktuatif akan tetapi dalam 3 tahun terakhir memiliki tren menurun, begitupula dengan target nasional yang menargetkan 10 kematian per 1000 kelahiran hidup, jumlah kematian di kota Semarang pada tahun 2014 hanya 9,37 per 1000 kelahiran hidup.

Dilihat dari hasil diatas dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap kesehatan tidak terlalu signifikan, menurut pelaksana hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mereka sendiri dan terhadap program pemerintah.

Pada sektor pendidikan, program penanggulangan kemiskinan berbasis keuarga mampu meringankan beban warga miskin untuk memenuhi pendidikan dasarnya. Selain memberikan bantuan dana pendidikan pemerintah juga memberikan bantuan dana penunjang pendidikan warga miskin. Hal ini dapat terlihat dari semakin tingginya angka

partisipasi kasar di Kota Semarang , pada tingkat sekolah dasar angka partisipasi ini selalu menembus angka 90 % setiap tahun dalam 5 tahun terakhir. Namun pada jenjang pendidikan SMP tingkat partisipasi murni hanya 80% dan dalam 5 tahun terakhir angka partisipasi tertingi adalah 88%. Pada tingkatan SMA atau Sederajat partisipasi murni masih berdifat fluktuatif anantara 80 dan 90 persen tiap ahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar hampir semua warga tercangkup dalam pendidikan yang ada namun tidak semuanya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu pelajar putus sekolah di kota Semarang masih berjumlah ratusan yaitu 316 di tahun 2015 saja. Angka putus sekolah tertingi ada pada tingkatan SMA sederajat yang pada tahun 2015 terdapat 233 siswa putus sekolah.

Kemudian peneliti juga akan mendisripsikan cara pemerintah mengatasi dampak negatif, secara umum dampak negatif yang muncul dari program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga adalah ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan yang diberikan pemerintah dan menciptakan masyarakat yang manja dan susah untuk berkembang, kemudian munculnya rasa iri dari masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut pemerintah memberikan syarat yang tegas bagi masyarakat untuk menerima bantuan, syarat ini di berikan agar masyarakat benar benar berkomitmen untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Untuk mengurangi rasa iri pemerintah melakukan transparansi dalam menentukan sasaran program dan menerima usulan penerima program baru dengan proses verifikasi yang transparan.

C. Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sudah sesuai dengan lampiran intruksi presiden no 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, namun ada beberapa tujuan pelaksanaan program yang tidak tercapai yaitu terkait waktu pencairan dana bantuan yang masih belum pasti dan kooordinasi antar lembaga untuk memastikan hak warga miskin untuk mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan, kemudian terkait dengan dampak yang diberikan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga di bidang ekonomi maupun kualitas kehidupan memberikan dampak positif meskipun tidak signifikan. Pertama pada dampak ekonomi program Pembangunan yang berkeadilan.

Memberikan dampak positif berupa membaiknya kondisi ekonomi masyarakat terdampak program hal ini terlihat dari membaiknya pola makan dan pola konsumsi , namun pelaksanaan program tidak memberikan dampak terhadap jumlah warga miskin yang ada di kota Semarang.

Pada dampak dibidang kualitas kehidupan dilihat dari sektor pendidikan dan kesehatan. Pada dua sektor ini program penanggulangan kemiskinan berbasis keluargamampu meberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga miskin karena mereka dijamin mendapatkan pelayanan dasar melalui jaminan sosial yang diberikan.. meskipun begitu jumlah angka kematian anak dan ibu masih fluktuatif, kemudian jumlah putus sekolah di kota Semarang masih tinggi.

Kemudian dalam mengatasi dampak negatif yang muncul pemerintah berupaya memberikan bantuan dengan jenis yang berbeda bukan bantuan materi akan tetapi diganti menjadi bantuan keterampilan, diharapkan dengan memberikan keterampilan dapat membuat warga miskin memiliki pilihan lebih banyak untuk mendapatkan pemasukan.

Saran

Setelah melakukan penelitian penleliti dapat meberikan saran bahwa pemerintah harus meningkatkan kooordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah agar

bantuan bantuan penentasan kemiskinan dapat terintergrasi dan dapat memberikan dampak yang maksimal, selain itu koordinasi yang baik akan membuat pencairan dan pelaksanaan program menjadi lebih baik. Kemudian meningkatkan syarat syarat yang harus dipenuhi penerima bantuan dan memberikan komitmen yang harus dipenuhi, kemudian pengawasan pemenuhan komitmen tersebut harus ketat dan transparan sehingga masyarakat dapat merubah diri mereka menjadi lebih baik. Komitmen ini diperlukan agar program pengentasan kemiskinan maupaun program peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Untuk mengatasi dampak negatif yang muncul pemerintah perlu meningkatkan kemandirian masyarakat dengan lebih banyak memberikan latihan keterampilan , kemudian di pantau bagaimana masyarakat mengoptimalkan keterampilan yang didapat agar bantuan yang diberikan dampaknya semakin terlihat dan bertambah besar.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Clayton, Richard, R. 2003, *The family, Marriage and Social Change*, Lexington MassToronto, De Hath and Company

Fitriana,C. (2014) *Evaluasi Kebijakan Ritel Modern Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media

Kusumanegara , Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (3th. Ed.). Sage Publications, Inc

Moleong, Lexy J. 2002. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*: Jakarta. PT Rineka Cipta

Syaifullah, Chavcay.(2006). *Generasi Muda Menolak Kemiskiinan*: Klaten.Cempaka Putih

Wibawa, samodra. Yuyun Purbokusuma. Agus Pramusinto, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

Winaarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo

_____ (2013). *Pedoman Umum PKH 2013*. Direktorat Jaminan Sosial- Direktorat Jenderal

Perlindungan dan Jaminan
Sosial Kementerian Sosial RI.

Sumber Lain

Intruksi Presiden Nomr 3 Tahun 2010,
Pembangunan yang Berkeadilan